Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan

https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Vol. 8, No.4, Maret 2022

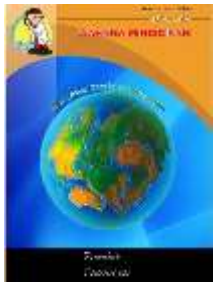

Analisis Partisipasi Publik dalam Kebijakan Penanganan Covid-19 di Desa Cibalongsari

Arini Nursyahbani[1], Rahmat Hidayat[2], Indra Aditya[3], Evi Priyanti[4]

[1]Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbsangsa Karawang
[2,3,4]Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: 1810631180048@student.unsika.ac.id, HP. 0895604262211

Info Artikel
Sejarah Artikel:
Diterima: 4 Maret 2022
Direvisi: 9 Maret 2022
Dipublikasikan: Maret 2022
e-ISSN: 2089-5364
p-ISSN: 2622-8327
DOI: 10.5281/zenodo.6358118

Abstract:

To achieve the success of a development, community participation is an important aspect. Because participation is the participation of a person or group of people in an activity that is carried out consciously. Sustainability of development results will not succeed if it is not supported by the role of the community. In an empowerment program, community participation must cover the entire process from the initial stage to the final stage. Sastropoetro said that the process of participation or participation describes personal involvement in the form of: (1) the decision-making process; (2) determine the desired needs; and (3) directing and realizing the goals and priorities to be achieved. In this concept it means that the needs and desires of the community to be achieved can be the encouragement or willingness of the community to participate in an empowerment program. In principle, every empowerment carried out by the community must always be improved in quality according to the wishes of the client (community) under it, but in reality this is not the case. One way to improve the quality of empowerment is to fulfill public complaints.

Keywords: *Development, Community, Participation*

PENDAHULUAN

Dalam keseluruhan proses pembangunan, peran serta masyarakat merupakan aspek yang sangat penting. Seperti kita ketahui, partisipasi telah lama menjadi penghias dalam pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota bahkan di tingkat desa. Untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal, tidak akan berhasil tanpa bantuan peran serta masyarakat. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, peran serta masyarakat dinilai sangat penting untuk dilanjutkan dari tahap awal hingga selesai. Sastropoetro, 1998 berpendapat bahwa Proses peran Serta atau Partisipasi menggambarkan keterlibatan personal dalam bentuk: (1) proses pengambilan

keputusan; (2) menetukan kebutuhan yang diinginkan; dan (3) menujukan dan mewujudkan tujuan dan prioritas yang ingin dicapai. Semua program, baik dalam mengambil keputusan, menentukan kebutuhan yang diinginkan, maupun mewujudkan tujuan, partisipasi masyarakat harus dilibatkan, karena melaluinya dapat diketahui hambatan dan hal-hal yang diperlukan untuk suatu kegiatan. Masyarakat juga yang nantinya akan meninjau hasil pembangunan di wilayahnya, termasuk pembangunan di tingkat desa untuk kemudian memanfaatkannya.

Selain itu, dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah sebagai penyedia layanan dan penggarap program pembangunan harus mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya serta harus menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, penting untuk menggali semua kekayaan yang ada di alam dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa juga keberadaan Sumber Daya Manusia yang penduduknya tidak sedikit, pemahaman dan kompetensinya harus dibina agar dapat memaksimalkan Sumber Daya Alam yang ada. Menurut Patton (2005:2), hakekat dari konsep pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan, dalam mengadakan perubahan-perubahan atau perkembangan menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya, pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan pokok pembangunan, dimana pembangunan harus dapat memberikan perubahan hidup bagi masyarakat untuk menuju suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sikap masyarakat sangat dibutuhkan dalam keikutsertaannya dalam program-program pembangunan, meskipun ada berbagai tanggapan di lapangan. Pada hakekatnya semua pelibatan diri yang dilakukan oleh masyarakat harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Namun, pada kenyataannya tidak seperti itu. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan adalah dengan memenuhi atau mengatasi keluhan dari masyarakat. Di sektor publik, dalam hal ini pemerintah, banyak yang memaknai aspirasi masyarakat akan kualitas pelayanan sebagai peluang untuk memperbaiki keadaan dari kurang baik menjadi lebih baik. Secara empiris pelaksanaan otonomi daerah membawa perbaikan dan kreasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berperan sebagai pengayom, pengabdi dan pembina. Mobilitas partisipasi dan subsistem masyarakat merupakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga kelurahan/desa memiliki kewenangan dalam hal mengurus dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.

Berdasarkan uraian di atas, maka pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dinilai sangat penting, karena hal ini merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang nantinya akan bermuara pada kerjasama yang teratur untuk kebaikan lingkungan. Jadi bukan sebaliknya, saling mempertahankan ego antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah merasa mampu mengembangkan wilayahnya tanpa partisipasi masyarakat, sedangkan masyarakat yang membiarkan dan tidak mau ambil pusing dengan urusan pemerintahan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pengelolaan kebijakan penanganan Covid-19 khususnya di Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga

merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Menurut Sugiyono (2013:29), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang ada dalam mendorong dilakukannya penelitian.

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode deskriptif dan pendeketan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandasakan pada filsafat *post positivesme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna, makna yang dimaksud adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak. (Sugiyono, 2014:9).

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kedaan peratisipasi masyarakat di desa cibalongsari dalam penyelenggaraan kebijakan menangani wabah covid-19 di desanya. Sehingga kita dapat mengetahui sejauh apa partisipasi masyarakat dalam hal penyelanggran kebijakan agar terhindar dari wabah covid-19.

Teknik pengambilan data dilalui melalui model tringulasi yang merupakan gabungan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun wawancara yang digunakan adalah tidak berstruktur sehingga tidak berpaku pada pedoman wawancara yang ditujukan kepada elemen-elemen terkait, observasi dilakukan di wilayah kabupaten Karawang dengan model Non-Participant Sementara studi dokumentasi diproleh melalui dua cara yakni teknik offlineseperti buku dan onlineseperti website.

Pada Penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang ditentukan sesuai dengan informasi yang kredibel tentang partisipasi masyarakat dalam peneylanggaraan kebijakan di desa cibalongsari. Dimana jenis penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*, agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Informan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Informan

No	Nama Informan	Status Informan	Keterangan
1.	Bapak Sodikin	Sekertaris Desa Cibalongsari	*Key Informan*
2.	Bapak Adkha	Ketua Kadusunan Terangsari 1,	*Key Secondary*
3.	Ibu Mimin	Masyarakat Desa Cibalongsari	*Informan*

Seiring dengan jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif kualitatif, dalam analisis data di lakukan dengan cara "mendeskripsikan". Adapun untuk mengelola data-data kualitatif ini dengan mengadakan observasi terus menerus, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Cibalongsari

Dalam peraturan daerah No 8 Tahun 2006 berisi tentang Pemerintahan

Desa dan menyatakan bahwa Pemerintahan Desa yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan yang bertugas melakukan tanggung jawab diantaranya yaitu :

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa

Perangkat desa yaitu Sekretariat desa, yang terdiri dari :

1. Sekretaris Desa
2. Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
3. Kepala Dusun (Kadus)

b. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kebijakan Penanganan Covid-19 di Desa Cibalongsari

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat penulis menggunakan terori dari sastropoetro, 1998 untuk menjadikan sebagai ukuran partisipasi masyarakat di Desa Cibalongsari. Proses peran Serta atau Partisipasi menggambarkan keterlibatan personal dalam bentuk: (1) proses pengambilan keputusan; (2) menetukan kebutuhan yang diinginkan; dan (3) menujukan dan mewujudkan tujuan dan prioritas yang ingin dicapai (Sastropoetro, 1998).

Bentuk-bentuk partisipasi ini kegiatan pelaksanaannya tentu memerlukan prasyarat, salah satunya adalah unsur kesukarelaan dalam melakuakan peran serta tersebut, karena dalam melakukan peran serta atau partisispasi berarti melakukan keterlibatan terhadap suatu masalah yang memerlukan peran serta dari berbagai kalangan disekelilingnya untuk dapat mencapai tujuan. Menurut Sastropoetro (1998) proses peran serta atau partisipasi menggambarkan keterlibatan personal dalam bentuk: 1) Proses pengambilan keputusan; mencakup proses pengambilan keputusan yaitu pengambilan bagian dengan menyalurkan ide, materi, tenaga, maupun keterampilan untuk mengambil suatu keputusan yang dibuat baik dalam sebuah organisasi maupun kehidupan bermasyarakat. 2) Menentukan kebutuhan yang diinginkan; mencakup kebutuhan yang diinginkan dalam partisipasi untuk melestarikan lingkungan dengan menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana. 3) Menujukan dan mewujudkan tujuan dan prioritas yang ingin dicapai; Untuk menunjukan dan mewujudkan tujuan dan prioritas yang ingin dicapai perlu adanya evaluasi. Evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh dan partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan.

1. Proses Pengambilan Keputusan

Menurut Sastropoetro (1998) partisispasi berarti melakukan keterlibatan terhadap suatu masalah yang memerlukan peran serta dari berbagai kalangan di sekelilingnya untuk dapat mencapai tujuan. Proses peran serta atau partisipasi dalam bentuk proses pengambilan keputusan mencakup proses pengambilan keputusan yaitu pengambilan bagian dengan menyalurkan ide, materi, tenaga, maupun keterampilan untuk mengambil suatu keputusan yang dibuat baik dalam sebuah organisasi maupun kehidupan bermasyarakat.

Dalam proses pengambilan keputusan di Desa Cibalongsari, mereka menggunakan cara dengan dikumpulkannya para perwakilan dari setiap Kadusunan dalam rapat minggon desa yang dilaksanakan seminggu sekali. Dalam rapat tersebut akan dijelaskan apa saja rencana dan keputusan yang nantinya akan dimusyawarahkan agar tercapa kemufakatan bersama khususnya tentang kebijakan penanganan Covid-19 yang terjadi di desa Cibalongsari sepanjang 2020.

Dari hasil wawancara di Desa Cibalongsari terkait proses pengambilan keputusan ini dinyatakan bahwa pemerintah desa selalu melibatkan masyarakatnya dalam proses pengambilan keputusan hingga tercapai kesepakatan bersama. Proses pengambilan keputusan ini mencakup tahap perencanaan, tahap

realisasi program dan tahap evaluasi. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yaitu dengan masyarakat yang memberikan inisiatif terkait membuat posko-posko satgas Covid-19 yang anggotanya dibentuk oleh masyarakat yang bersukarelawan. Anggota satgas tersebut terdiri dari beberapa relawan satgas kedusunan dan relawan satgas desa. Di posko satgas Covid-19 ini dipegang tanggungawabnya oleh Kadus sementara untuk pelaksanaan di lapangan menjadi tanggung jawab RW, dan sebagai anggotanya adalah RT-RT setempat. Kemudian, pemerintah desa pun memberikan payung hukum sehingga dikeluarkannya Peraturan Desa Cibalongsari No. : 443/Kep.11/Ds/Tahun 2020 tentang Satgas Covid-19 Desa Cibalongsari yang tersebar di setiap Kadusunan. Untuk melindungi para relawan satgas Covid-19 yang telah membantu meringankan beban pemerintah desa dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Dalam proses pengambilan keputusan ini dirasa sudah cukup baik pelaksanaannya karena aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada masing-masing Kadus disampaikan dengan baik oleh Kadus kepada pemerintah desa saat rapat mingguan yang diadakan. Dan para relawan satgas Covid-19 ini dinilai cukup baik dalam menangani kasus ini sehingga masyarakat cukup terbantu. Namun, dalam pengambilan keputusan terkait melaporkan kasus Covid-19 ini masih dirasa sulit untuk mesyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat yang terkena Covid-19 merasa takut dikucilkan oleh masyarakat yang lain. Sehingga ada beberapa kasus hingga meninggal didalam rumah karena tidak ada yang tahu terkait terpaparnya masyarakat tersebut. Sehingga para relawan satgas baik Kadus pun tidak dapat membantu karena masyarakat yang menutup diri.

2. Menetukan Kebutuhan yang diinginkan

Dalam menentukan kebutuhan ini mencakup kebutuhan yang diinginkan dalam partisipasi untuk melestarikan lingkungan dengan menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana. Sebagaimana yang tercantum pada Protokol Penanganan Bencana Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, pada posko-posko satgas Covid-19 harus dilengkapi dengan thermal scanner, masker, sarung tangan, sanitizer, vitamin/suplemen dan sarana prasarana preventif lainnya untuk memaksimalkan para relawan satgas Covid-19 dalam tugasnya saat turun ke lapangan. Dalam hal ini, pemerintah harus mendanai posko-posko satgas Covid-19 secara penuh. Partisipasi masyarakat dalam menentukan kebutuhan yang diinginkan salah satunya, yaitu kebutuhan akan biaya kehidupan sehari-hari yang semakin tersendat karena adanya Covid-19. Sehingga masyarakat meminta agar dana bantuan langsung (BLT) dari pemerintah turun secepatnya dan sampai kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkannya. Sehingga pemerintah desa harus mengalokasikan keuangannya dengan seoptimal mungkin.

“Dari anggaran desa ini diutamakan 8% untuk penanganan Covid-19. Dari 8% ini, oleh desa dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan-bantuan, yaitu BLT (bantuan langsung tunai), APD (Alat Pelindung Diri).” (Pak Sodikin, Sekertaris Desa Cibalongsari)

Sebagaimana hasil wawancara di Desa Cibalongsari, pemerintah desa mengeluarkan anggaran sebesar 8% untuk penanganan Covid-19. Namun, dari pemerintah pusat dana yang diturunkan cukup minim dan terkadang tidak sampai kepada pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa cukup kesulitan dalam memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat. Selain terkait BLT, pemerintah juga cukup kesulitan terkait pemberian upah terhadap relawan di posko-posko satgas Covid-19.

"Satgas ini bekerja tanpa henti 24 jam secara bergantian. Agar setiap ada kontak dari masyarakat para satgas bisa langsung datang, desa menyiapkan mobil ambulans dan mobil desa. Satgas ini terkadang dibantu oleh LSM setempat sekitar 3 orang" (Pak Sodikin, Sekertaris Desa Cibalongsari)

Meskipun mereka merupakan relawan, dengan pekerjaan yang seberat itu bahkan bisa merenggut nyawa maka diperlukannya upah untuk para relawan tersebut. Mereka yang bersukarela menjadi relawan ini tentu telah melakukan banyak pengorbanan. Salah satunya, yaitu waktu yang mereka berikan. Karena seperti yang Pak Sodikin selaku Sekretaris Desa Cibalongsari katakana bahwa para satgas ini bekerja tanpa henti selama 24 jam secara bergantian. Agar tidak ada masyarakat yang membutuhkan terabaikan. Maka dari itu, diharapkan pemerintah pusat untuk lebih mengalokasikan keuangannya untuk keadaan darurat seperti ini.

3. Menujukan dan Mewujudkan Tujuan dan Prioritas yang Ingin dicapai

Untuk menunjukan dan mewujudkan tujuan dan prioritas yang ingin dicapai perlu adanya evaluasi. Evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh dan partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan. Dalam tahap evaluasi ini, pihak pemerintah Desa Cibalongsari telah mengikutsertakan perwakilan masyarakat, yaitu Kadus untuk melakukan rapat mingguan yang didalamnya termasuk pada diskusi terkait keluhan-keluhan yang diberikan oleh masyarakat. Hal yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat, yaitu dalam aspek perekonomian. Dengan adanya wabah Covid-19 ini, banyak masyarakat yang pendapatannya berkurang atau bahkan kehilangan pekerjaannya. Keluhan seperti ini tidak hanya muncul dikalangan masyarakat, namun staf pemerintahan juga merasakan hal yang serupa. Penurunan kualitas perekonomian ini sudah menginjak diatas angka 80%. Hal ini terjadi karena UMKM yang dibatasi, pengurangan jumlah pelaku usaha, pedagang kaki lima dan restoran yang dibatasi, serta tempat-tempat seperti mall, minimarket dan pasar yang ditutup. Dengan keadian seperti ini, tentu pendapatan masyarakat sangat berkurang. Yang biasanya buka sampai tengah malam atau bahkan 24 jam, kini dibatasi hanya diperbolehkan hingga jam 9 malam saja karena adanya operasi. Tak hanya itu, karyawan kini tidak diperbolehkan lembur serta jam kerjanya dikurangi. Bahkan ada beberapa tempat yang hingga memecat karyawannya sehingga angka pengangguran pun meningkat pada saat pandemic Covid-19 ini.

Sementara menurut salah satu Kadus yang ada di Desa Cibalongsari, yaitu Bapak Adhka selaku Kepala Dusun Terangsari 1 beliau mengatakan bahwa bantuan sosial yang dirasakan oleh masyarakat khususnya daerah kedusunan Terangsari 1 ini berasal dari pemerintah pusat dan daerah berupa uang tunai dan kebutuhan pokok. Sedangkan dari pihak desa hanya berupa kebutuhan pokok yang diberikan oleh Ibu Kepala Desa secara pribadi. Hal ini sejalan dengan kesaksian dari salah satu masyarakat Desa Cibalongsari, yakni Ibu Mimin yang berkata bahwa beliau maupun masyarakat yang lain tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk apapun. Kalaupun masyarakat meminta bantuan tersebut melalui RT masyarakat hanya diminta untuk menunggu. Terkait bantuan ini terdapat ketidak selarasan antara pihak pemerintah desa dengan Kadus serta masyarakat setempat. Untuk penerima bantuan dari pusat ataupun daerah yang ada, pihak pemerintah desa tidak dilibatkan dalam prosesnya. Data yang diperoleh untuk penerima bantuan juga merupakan data yang diperoleh dari Dinas Sosial yang belum diperbarui sehingga pendistribusiannya tidak optimal. Dan untuk pendistribusiannya sendiri, itu

melalui ojek online serta ekspedisi pengiriman sehingga pihak desa samasekali tidak terlibat.

Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat di Desa Cibalongsari juga nampaknya belum maksimal. Karena masyarakat mematuhi protokol lesehatan hanya pada saat awal-awal tersebarnya virus Covid-19 ini saja. Bahkan untuk vaksinasi, masyarakat setempat masih banyak yang belum mempercayai terkait pentingnya vaksinasi. Maka sangat diperlukannya sosialisasi atas kesadaran akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Maka dari itu, menurut penulis, dalam upaya memenuhi serta mensejahterakan masyarakat diperlukan kontribusi yang selaras antara pemerintah provinsi, daerah serta desa agar tercapai tujuan yang dinnginkan oleh bersama. Pak Sodikin selaku Sekretaris Desa Cibalongsari juga berkata bahwa Desa Cibalongsari termasuk kedalam desa yang maju namun belum mandiri. Karena Desa Cibalongsari belum memiliki PAD nya sendiri. Dan tidak lupa pula untuk masyarakat diharapkan bisa lebih meningkatkan kesadaran terkait virus Covid-19 yang terjadi ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, mengenai partisipasi masyarakat di Desa Cibalongsari, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam hal proses penganbilan keputusan bisa dikatakan sudah baik, hal itu terlihat ketika setiap kadusunan yang aktif mengirim perwakilan dalam rapat minggon unntuk membahas dan mendiskusikan terkait bencana Covid-19 dan bagiamana cara penanganannya
2. Pada konteks menujukan dan mewujudkan tujuan dan prioritas yang ingin dicapai pihak Desa Cibalongsari sudah melakukan upaya yang terbaik untuk mengtasai wabah Covid-19 ini yaitu dengan cara membentuk satgas Covid-19 dan mendirikan posko-posko siaga covid-19, hal tersebut adalah bagamana upaya pemeintah Desa Cibalongsari dalam memberikan perindungan dan pelayanan terhadap masyarakat, selain itu juga pemerintah desa memberikan dana bantuan langsung (BLT) kepada masyarakat yang dananya berasal dari anggaran desa, yaitu diutamakan 8% untuk penanganan Covid-19. Dari 8% ini, oleh desa dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan-bantuan, yaitu BLT
3. Serta dalam menujukan dan mewujudkan tujuan dan prioritas yang ingin dicapai belum maksimal bisa terlihat dari pihak masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya isolasi mandiri, sehingga ada masyarakat yang sebenarnya positif Covid-19 tetapi masih keluar rumah dan beraktifitas seperti biasanya, seperti keluar rumah, berinteraksi dengan tetangga yang lain, selain itu ada juga masyaralat yang enggan memberitahukan keadaan keluarganya yang sedang isolasi mandiri dikarenakan mereka merasa malu dan takit dikucilkan tetapi yang pemerintah desa inginkan adalah keterbukaan informasi dari keluarga yang terpapar agar pemerintah desa dapat memeberikan penngannan dan bantuan yang baik kepada masyarakat.

Selain itu jika di lihat dari pihak pemerintah daerah, belum bisa memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat di Desa seperti contoh kecilnya di Desa Cibalongsari, yang dimana masyarakat Desa masih banyak yang tidak mendapatkan dana bantuan langsung (BLT) dari dinas terkait. Sedangkan masyarakat sangat membutuhkan data tersebut untuk kelangsungan hidup, seperti yang kita tahu bahwa dampak nyata Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat yautu di karenakan terjadinya PSBB dan juga PPKM yang membuat

pedagang dan usaha-usaha kecil lainnya terbatas dalam jam operasi dagang dan bekerja, selain itu juga korban Covid-19 yang mengalami isolasi mandiri di rumahnya beserta kelurganya, yang pastinya membutuhkan makanan, obat-obatan serta alat kesehatan dalam masa isloasi mandiri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi R. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press.

Bleszeinsky, G. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan di kawasan Pantai Padang. *Journal of Education on Social Science)*, 1-13.

Budi, Winarno. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: *Center Of Academic Publishing Service*.

Bugin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga Universitas Press.

Mikkelesen, Britha. (1999). *Metode Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Moleong, Lexy. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rahayu, Ani Sri. (2018). *Pengantar Pemerintahan Desa*. Malang: Sinar Grafika.

Rosyida, Isma dan Nasdian, F N. (2017). Partisipasi Masyarakat dan Stakeholde dalam Penyelenggaraan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Dampaknya terhadap Komunitas Pedesaan. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 41-70.

Theresia, Aprillia. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Wijaksono, S. (2013). Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman. *Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 24-32.